



PENGARUH TEKANAN FISKAL, BELANJA MODAL DAN PEMBIAYAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020-2022)

Tini Setiawati, Dwi Cahyo Utomo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect transparency in provincial local governments in Indonesia using legitimacy theory to generate testable hypotheses and from testing these hypotheses provide empirical findings. The factors that affect transparency in this study are focused on fiscal pressure, capital expenditure and equity participation financing.

This study uses secondary data obtained from www.komisiinformasi.go.id and www.djpk.kemenkeu.go.id with a population of 38 provinces in Indonesia for the period 2020-2022. By using the purposive sampling method, the sample obtained was 31 provincial local governments in Indonesia. The analysis method used in this research is multiple linear regression analysis.

Based on statistical tests that have been carried out in this study, it shows that fiscal pressure has a positive and significant effect on transparency, while capital expenditure and equity participation financing have no effect on transparency.

Keywords: *Fiscal Pressure, Capital Expenditure, Equity Participation Financing, Transparency.*

PENDAHULUAN

Bentuk anggaran publik dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur keuangan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ritonga & Syahrir, 2016). Setiap biaya yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan berdampak pada kebutuhan dan kepentingan umum dalam manajemen keuangan publik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, semua tindakan yang berkaitan dengan keuangan daerah dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Data yang ditemukan di situs resmi KPK memperlihatkan bahwa KPK telah menindak tidak kurang dari 23 gubernur dan 155 bupati/wali kota sejak tahun 2004 hingga 2022. Jumlah ini mungkin lebih besar jika ditambahkan dengan informasi dari Kejaksaan dan Kepolisian. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), dari tahun 2020 hingga 2022, terdapat 55 kepala daerah didakwa karena korupsi oleh aparat penegak hukum. Hal ini yang membuat masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan informasi publik untuk mengetahui bagaimana dana pemerintah daerah digunakan. Warga negara, sebagai penyedia sumber daya, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari entitas publik mereka (Piotrowski & Van Ryzin, 2007). Selain itu, masyarakat umum memiliki hak dasar terhadap pemerintah daerah, termasuk hak untuk mengetahui (right to know), hak untuk diberi informasi (right to informed), hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to listened to). Ditambah dengan adanya Regulasi Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya

¹ Corresponding author

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Menurut Piotrowski & Van Ryzin (2007), transparansi menandakan kapasitas individu atau kelompok untuk memastikan apa yang terjadi di dalam lembaga sektor publik.

Sebuah survei internasional yang disebut *Open Budget Survey* menilai transparansi, pengawasan, dan partisipasi komparatif, independen, dan reguler di seluruh dunia dalam anggaran nasional di lebih dari 120 negara dan memberikan skor 70 untuk tingkat transparansi anggaran di Indonesia untuk tahun 2020 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-17 dari seluruh negara yang disurvei dan peringkat pertama negara-negara di ASEAN (International budget, 2021). Berbeda dengan pemerintah pusat, transparansi pengelolaan keuangan daerah masih belum dikatakan baik secara keseluruhan. Dimana pada tahun 2020 indeks transparansi pemerintah provinsi di Indonesia menurut komisi informasi terdapat 21 provinsi dari 33 yang melakukan monev di komisi informasi masih berada di bawah rata-rata skor nasional.

Kondisi perekonomian suatu daerah dianggap sebagai faktor yang memengaruhi transparansi. Seperti Tejedo-Romero & de Araujo (2018) yang menganalisis elemen-elemen yang berdampak pada transparansi pada masa krisis di Spanyol. Faktor-faktor yang diterapkan dalam riset ini meliputi investasi, tekanan fiskal, pengangguran, gender, jumlah pemilih, partisipasi pemilu dan persaingan politik. Hasilnya, investasi dan tekanan fiskal tidak berpengaruh terhadap transparansi, hal ini karena pada masa krisis sumber daya yang tersedia bagi pemerintah kota lebih sedikit sehingga tidak ada tuntutan untuk melakukan transparansi. Penelitian lainnya dilakukan pada saat kondisi ekonomi cukup stabil seperti yang dilakukan Balaguer-Coll & Brun-Martos (2021) yang menjelaskan bahwa transparansi dipengaruhi secara positif oleh tekanan fiskal. Baldissera et al. (2020) membagi tingkat transparansi menjadi faktor sosial ekonomi, fiskal/keuangan daerah, dan politik serta mengemukakan hasil bahwa transparansi dipengaruhi secara positif oleh belanja modal.

Di Indonesia terdapat penelitian dari Nuryani & Firmansyah (2020) yang mengemukakan bahwa transparansi dipengaruhi secara positif oleh belanja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Mubarak et al. (2023) yang mengemukakan hasil bahwa belanja modal berhubungan negatif dengan transparansi karena pengelolaan belanja modal sebagian besar digunakan untuk penyediaan infrastruktur, belum berjalan dengan baik. Akibatnya, pemerintah daerah dengan belanja modal yang besar terus memberikan informasi keuangan yang terbatas. Penelitian lain dilakukan oleh Yuniar & Firmansyah (2023) yang meneliti pada topik anggaran yang jarang diteliti yaitu pembiayaan penyertaan modal daerah yang berfokus pada pembentukan badan usaha milik daerah yang menemukan hasil bahwa transparansi tidak dipengaruhi penyertaan modal daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Garrido-Rodríguez et al. (2019) dan membuktikan bahwa semakin banyak perusahaan milik publik maka pemerintah akan semakin transparan.

Merujuk pada konteks latar belakang yang telah dijelaskan yang mana masih tampak hubungan yang tidak konsisten terkait faktor yang memengaruhi transparansi pada saat perekonomian sedang krisis dan stabil terutama bidang anggaran. Serta untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat terkait faktor anggaran yang memengaruhi transparansi di Indonesia pada masa covid-19 dan pemulihan setelah covid-19 dengan menggunakan pengukuran indeks transparansi yang lebih kuat penulis tertarik untuk menjelaskan penelitian terkait permasalahan **“Pengaruh Tekanan Fiskal, Belanja Modal dan Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah terhadap Transparansi”** (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020-2022).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menitikberatkan pada interaksi antara entitas dengan masyarakat. Pada dasarnya berkaitan tentang bagaimana suatu entitas bekerja untuk memastikan bahwa tindakannya sejalan dengan norma-norma yang mengatur struktur sosial serta mendorong keselarasan dan keharmonisan dalam pemenuhan harapan masyarakat. Teori legitimasi dikembangkan oleh

Suchman (1995) dan menyatakan bahwa legitimasi mengacu pada persepsi atau asumsi bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan norma, nilai, keyakinan, dan definisi sistem sosial tertentu.

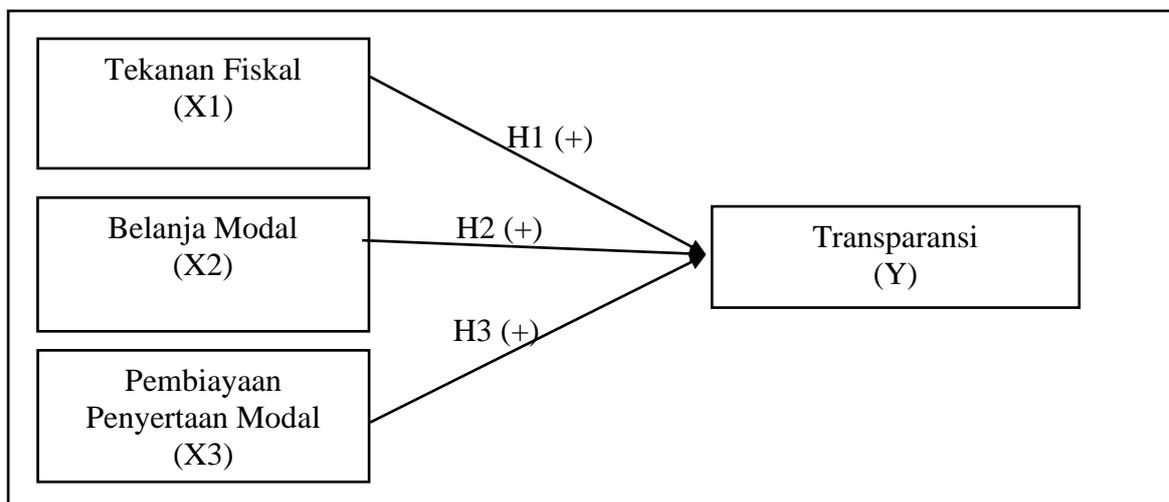
Colquhoun (2013) menyatakan bahwa penelitian tentang akuntansi sektor publik sering membahas legitimasi. Entitas yang terlibat dalam realisasi dan pemberian hak publik termasuk dalam sektor publik yang dipertimbangkan. Dari sudut pandang warga negara, informasi yang diungkapkan oleh badan pemerintah harus mempertimbangkan harapan, kepentingan, dan nilai-nilai pemangku kepentingan, dan kebijakan yang diambil serta perilaku yang dilaksanakan harus sesuai dengan nilai dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan C. M. Deegan (2019), legitimasi dianggap sebagai “sumber daya” yang menjadi sandaran organisasi untuk bertahan hidup dan diberikan kepada organisasi oleh masyarakat dan merupakan sebuah hal yang penting.

Selain itu, Suchman (1995) berpendapat bahwa meskipun hakikatnya tidak pernah ada organisasi yang sungguh-sungguh menyenangkan seluruh pemangku kepentingannya dan dapat memiliki sistem sosial yang konsisten, tetapi organisasi selalu mampu meningkatkan, mempertahankan, atau memperbaiki untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi mereka. Dalam keadaan seperti ini, organisasi pasti akan berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan legitimasi mereka melalui komunikasi, dan dengan menyesuaikan hasil, tujuan, dan metode operasi mereka agar konsisten dengan legitimasi yang ada. Pengungkapan informasi tentang aktivitas organisasi adalah cara untuk melegitimasi tindakan kepada pemangku kepentingan mereka dan memberikan legitimasi kepada organisasi (Archel et al., 2009).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menjelaskan perihal bagaimana variabel dalam suatu penelitian saling terhubung. Penelitian ini memakai faktor dependen dan independen. Faktor tidak bebas pada penelitian ini adalah transparansi. Faktor bebas meliputi tekanan fiskal, belanja modal, dan pembiayaan penyertaan modal. Hubungan antarfaktor ini digambarkan oleh kerangka pemikiran berikut :

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tekanan Fiskal Terhadap Transparansi

Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan pajak serta retribusi daerah memberikan payung hukum kepada pemerintah daerah terkait dengan kewenangannya dalam melaksanakan wajib pendapatan daerah (Yuniar & Firmansyah, 2023). Dengan kewenangan tersebut, seharusnya pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk memperoleh pendapatan. Selain itu, karena warga negara harus membayar pajak, maka jika ada peningkatan pajak, masyarakat mungkin akan meminta informasi tentang bagaimana uang mereka dibelanjakan

dan dengan demikian memantau kontribusi mereka dengan lebih cermat dengan menyerukan transparansi yang lebih besar melalui keterbukaan keuangan. Menurut teori legitimasi, Pemerintah akan semakin terdorong untuk memberikan informasi yang lengkap dengan kinerja yang baik untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat (De Fine Licht et al., 2014). Tingginya penerimaan pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dari daerahnya.

Tejedo-Romero & de Araujo (2018) memaparkan bahwa tekanan fiskal tidak berpengaruh terhadap transparansi karena pada masa krisis sumber daya yang tersedia bagi pemerintah kota lebih sedikit yang artinya tekanan fiskal yang besar tidak diimbangi dengan pendapatan yang tinggi sehingga tidak mencukupi untuk melakukan transparansi. Berbeda dengan penelitian Balaguer-Coll & Brun-Martos (2021) yang mengemukakan adanya hubungan positif antara tekanan fiskal terhadap transparansi yang disebabkan meningkatnya minat dengan melakukan pemantauan lebih dekat terhadap pajak dan bagaimana cara uang mereka dibelanjakan. Mengikuti hubungan positif yang diharapkan dalam penelitian sebelumnya, diajukan hipotesis berikut:

H1 : Tekanan fiskal berpengaruh positif terhadap transparansi.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Transparansi

Belanja modal biasanya berkaitan dengan sarana dan prasarana pelayanan publik. Besarnya belanja modal keuangan merupakan informasi penting yang menunjukkan seberapa besar alokasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanti & Suparman, 2017). Teori legitimasi menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus bertindak sejalan dengan nilai dan norma yang mengatur struktur sosial yang mendorong keselarasan dan keharmonisan dalam pemenuhan harapan masyarakat. Dalam belanja modal, pemerintah daerah harus memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan membangun infrastruktur pelayanan dasar kepada masyarakat (Yuniar & Firmansyah, 2023). Karena menurut Pina et al. (2010) menawarkan citra pemerintahan yang baik dalam menanggapi tekanan umum adalah cara untuk mengamankan legitimasi dan meningkatkan reputasi kota.

Penelitian yang dilakukan Tejedo-Romero & de Araujo (2018) menyatakan bahwa belanja transparansi tidak dipengaruhi oleh belanja modal karena pada masa krisis sumber daya yang tersedia bagi pemerintah kota lebih sedikit sehingga tidak ada tuntutan untuk melakukan transparansi. Berbeda dengan penelitian di Brazil yang dilakukan Baldissera et al. (2020) yang mengemukakan bahwa transparansi dipengaruhi belanja modal karena masyarakat Brazil memahami bahwa proyek-proyek publik yang memerlukan investasi besar akan meningkatkan kondisi kehidupan mereka, sehingga manajer publik terdorong untuk melakukan transparansi agar masyarakat bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan. Dengan pendekatan yang serupa dengan asumsi bahwa semakin besar pengeluaran, semakin banyak dana yang tersedia untuk program pemerintah daerah, semakin tinggi mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat, dan semakin lengkap pengungkapan informasi mengenai hal tersebut untuk mempertahankan legitimasinya di masyarakat. Sehingga ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap Transparansi

Pengaruh Pembiayaan Penyertaan Modal Terhadap Transparansi

Bentuk yang paling umum dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan investasi adalah penyertaan modal pada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah mendirikan badan usaha dengan beberapa tujuan, antara lain memberikan pelayanan publik, meningkatkan pendapatan, ikut serta dalam persaingan pasar untuk menghasilkan keuntungan, dan menjadi pionir dalam bidang usaha yang kurang diminati oleh swasta (Yuniar & Firmansyah, 2023). Berdasarkan teori legitimasi, pemerintah daerah yang banyak membentuk perusahaan publik untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan informasi pengelolaannya sebagai bentuk untuk mempertahankan legitimasi di masyarakat karena pemerintah dianggap mampu memberikan kesejahteraan melalui badan usaha milik daerah (BUMD) yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan Yuniar & Firmansyah (2023) mengemukakan bahwa pembiayaan penyertaan modal tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah karena hanya sedikit BUMD yang dikenal oleh masyarakat sehingga besar kecilnya pembiayaan

penyertaan modal tidak memengaruhi transparansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Garrido-Rodríguez et al. (2019) dan Cuadrado-Ballesteros (2014) yang menyatakan bahwa semakin banyak badan publik sebagai peranan penyediaan layanan publik bersama di daerah, maka tingkat transparansi akan semakin tinggi. Sesuai dengan pertimbangan tersebut yang menyatakan bahwa pendirian perusahaan publik berpengaruh positif terhadap transparansi, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pembiayaan penyertaan modal Berpengaruh Positif Terhadap Transparansi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjadikan pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada periode 2020 hingga 2022. SPSS dipilih untuk menganalisis data yang telah yang di dalamnya mencakup pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memilih pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada periode 2020-2022 sebagai populasi. Pada tahun 2022 terjadi pemekaran 4 provinsi baru yang meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, sehingga jumlah populasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Populasi

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Provinsi di Indonesia</i>
2020	34 Provinsi
2021	34 Provinsi
2022	38 Provinsi
Jumlah Populasi	106

Sampel diambil dengan memakai metode purposive sampling yang merupakan prosedur pemilihan sampel dengan menerapkan suatu syarat atau kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria populasi yang digunakan sebagai sampel adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah provinsi yang mengikuti monitoring dan evaluasi oleh komisi informasi pusat selama tahun 2020-2022.
2. Pemerintah daerah provinsi yang menyajikan informasi secara lengkap terkait data yang diperlukan pada penelitian selama tahun 2020-2022.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yakni variabel dependen yang diukur melalui transparansi dan variabel independen yang diukur melalui tekanan fiskal, belanja modal, dan pembiayaan penyertaan modal. Berikut merupakan pengukuran dari tiap variabel yang digunakan

Tabel 2
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen Transparansi	Transparansi	Nilai antara 0 s.d. 100 terhadap kepatuhan pelaksanaan pengelolaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.
Variabel Independen Tekanan Fiskal	TF	Logaritma natural total realisasi pajak dan retribusi / jumlah penduduk
Belanja Modal	BM	Total realisasi belanja modal / total realisasi belanja
Pembiayaan Penyertaan Modal	PPM	Total Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal / Total Realisasi Pembiayaan Pengeluaran

Metode Analisis

Regresi linier berganda yakni sebuah cara uji statistik yang dipergunakan untuk mengevaluasi keterkaitan variabel dependen serta dua maupun lebih variabel independennya. Tujuannya untuk mengidentifikasi bagaimana variabel penelitian dan variabel bebas berkorelasi satu sama lain. Keputusan tentang analisis ilmiah dan kebijakan dapat dibuat dengan bantuan metode ini. Dalam proses pemeriksaan, berikut rumus yang digunakan:

$$\text{Transparansi} = \alpha + \beta_1 \text{TF} + \beta_2 \text{BM} + \beta_3 \text{PPM} + \varepsilon$$

Keterangan:

Transparansi : Transparansi Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Variabel Independen

TF : Tekanan Fiskal

BM : Belanja Modal

PPM : Pembiayaan Penyertaan Modal

ε : Error Term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini akan memuat penjabaran terkait dengan sampel yang digunakan serta analisis data yang diikuti dengan hasil temuan.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dan memakai data sekunder yang terdapat di situs resmi komisi informasi pusat dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Rentang waktu penelitian mencakup periode mulai tahun 2020 hingga 2022 dengan populasi penelitian berjumlah 34 provinsi di tahun 2020-2021 dan 38 provinsi di tahun 2022. Sampel diambil dengan mengaplikasikan metode purposive sampling. Variabel independen yang digunakan meliputi tekanan fiskal, belanja modal, dan pembiayaan penyertaan modal. Sementara variabel dependennya adalah transparansi.

Tabel 3
Data Observasi

<i>No</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Total</i>
1.	Pemerintah daerah provinsi Indonesia periode 2020-2022.	38
2.	Pemerintah daerah yang tidak mengikuti monitoring dan evaluasi komisi informasi pusat dari tahun 2020-2022.	(5)
3.	Pemerintah daerah provinsi yang tidak menyajikan data secara lengkap tahun 2020-2022.	(2)
4.	Jumlah sampel penelitian.	31
5.	Periode penelitian (2020-2022)	3
Jumlah data penelitian (31 x 3)		93

Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari uji analisis ini adalah untuk menunjukkan ringkasan jumlah, minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari data yang dievaluasi (Ghozali, 2021).

Tabel 4
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maksimum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Transparansi_Y	93	36,51	93,67	74,6474	9,83739
TF_X1	93	17,12	19,76	17,9687	0,51795
BM_X2	93	0,04	0,27	0,1660	0,04204
PPM_X3	93	0,02	1,00	0,5233	0,30032
Valid N (listwise)	93				

Sumber : Output SPSS 24, data sekunder yang diolah tahun 2024

Uji Asumsi Klasik

Data yang telah dikumpulkan dapat diproses menggunakan analisis regresi jika berbagai syarat uji asumsi klasik terpenuhi seperti uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, maupun heteroskedastisitas. Tabel 5 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi > 0.05 sehingga data penelitian terdistribusi normal.

Tabel 5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		93
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std.Deviation</i>	9,36277153
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,083
	<i>Positive</i>	0,043
	<i>Negative</i>	-0,083
<i>Test Statistic</i>		0,083
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>		0,133 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS 26, data sekunder yang diolah tahun 2024

Tabel 6 menyajikan hasil uji multikolinearitas dengan nilai tolerance > 0.1 dan nilai VIF ≤ 10 sehingga data penelitian tidak memiliki masalah multikolinearitas. Selanjutnya uji autokorelasi yang dilakukan dengan run test dapat diketahui hasilnya dengan melihat Tabel 7, yang mana nilai signifikansi menunjukkan nilai > 0.05 sehingga data penelitian aman dari masalah autokorelasi.

Tabel 6
Hasil Pengujian Multikolinearitas

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	<i>(Constant)</i>		
	TF_X1	0,910	1,099
	BM_X2	0,937	1,067
	PPM_X3	0,867	1,167

Sumber: Output SPSS 26, data sekunder yang diolah tahun 2024

Tabel 7
Hasil Pengujian Autokorelasi

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	0,52214
<i>Cases < Test Value</i>	46
<i>Cases >= Test Value</i>	47
<i>Total Cases</i>	93

Number of Runs	42
Z	-1,146
Asymp. Signifikansi (2-tailed)	0,252

Sumber: Output SPSS 26, data sekunder yang diolah tahun 2024

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Data dikatakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi tiap variabel tidak kurang dari 0.05. Tabel 8 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi tiap variabel memenuhi kriteria tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Tabel 8
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	28,680	21,852		1,312	0,193
	TF_X1	-1,075	1,224	-0,97	-0,878	0,382
	BM_X2	-7,754	14,863	-0,57	-0,522	0,603
	PPM_X3	-1,417	2,176	-0,74	-0,651	0,517

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah tahun 2024

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan serangkaian uji dalam analisis regresi berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R²), uji statistik F, dan uji statistik T. Tabel 9 menyajikan hasil uji koefisien determinasi (R²) antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,064 atau 6,4%. Ini mengindikasikan bahwa 6,4% dari variasi dalam transparansi dapat dijelaskan oleh variabel yang terdapat dalam penelitian ini, sisanya oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,307 ^a	0,094	0,064	9,51926

Sumber: Output SPSS 26, data sekunder yang diolah tahun 2024

Tabel 10 menyajikan hasil uji statistik F antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen secara simultan berhubungan dengan variabel dependen dalam model regresi. Menurut Ghazali (2021), signifikansi nilai $F < 0.05$ menandakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel 10, nilai signifikansi < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara simultan.

Tabel 10
Hasil Pengujian Statistik F

Model	Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	838,369	3	279,456	3,084	0,031 ^b
	Residual	8064,857	89	90,616		
	Total	8903,226	92			

Sumber: Output SPSS 26, data sekunder yang diolah tahun 2024

Uji statistik t dibutuhkan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dengan variabel dependen (Ghozali, 2021). Dalam uji statistik t, jika nilai

signifikansi < 0.05 , maka pengaruh signifikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat divalidasi benar adanya.

Tabel 11
Hasil Uji t

		<i>Coefficients^a</i>				
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	-2,238	35,849		-0,62	0,950
	TF_X1	4,448	2,009	0,234	2,214	0,029
	BM_X2	-26,701	24,384	-0,114	-1,095	0,276
	PPM_X3	2,666	3,570	0,081	0,747	0,457

a. *Dependent Variable: Transparansi*

Sumber : Output SPSS 26, data sekunder yang diolah tahun 2024

Adapun ringkasan terhadap hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Ringkasan Hasil Penelitian

<i>Hipotesis</i>	<i>Pernyataan</i>	<i>Hasil</i>
H ₁	Tekanan fiskal berpengaruh positif terhadap transparansi	Diterima
H ₂	Belanja modal berpengaruh positif terhadap transparansi	Ditolak
H ₃	Pembiayaan penyertaan modal berpengaruh positif terhadap transparansi	Ditolak

Analisis di Tabel 11 menghasilkan uji signifikansi parsial mendukung hipotesis pertama, yaitu transparansi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tekanan fiskal. Hasil dari uji t dari tabel di atas, nilai koefisien β dari ukuran perusahaan memaparkan nilai positif yaitu 4,448, dengan nilai t hitung 2,214 dan nilai signifikansi 0,015. Berdasarkan hasil tersebut dapat diamati nilai dari t hitung $> t$ tabel yaitu $2,214 > 1,990$ dengan nilai signifikansi $0,029 < 0,05$ artinya transparansi dipengaruhi secara substansial oleh tekanan fiskal. Dengan demikian, **hipotesis kesatu (H1) diterima.**

Hasil uji statistik konsisten dengan teori legitimasi dimana pemerintah daerah telah memastikan bahwa tindakannya sejalan dengan norma-norma yang mengatur struktur sosial di masyarakat dan telah mendorong keselarasan serta keharmonisan dalam pemenuhan harapan masyarakat. Hasil analisis menyatakan tekanan fiskal yang tinggi akan meningkatkan pajak dan retribusinya guna memenuhi sumber daya fiskal yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik. Kemudian, pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan pajak dan retribusi lebih besar akan memberikan informasi pengelolaan anggaran secara lengkap pada situs resminya guna meningkatkan pandangan baik terhadap pemerintah daerah dari masyarakat sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan data, tekanan fiskal mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Meski peningkatannya tidak signifikan, pemerintah daerah telah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajaknya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Tren kenaikan tersebut juga menandakan permasalahan ilusi fiskal semakin berkurang. Temuan ini bertentangan dengan anggapan bahwa pemerintah daerah belum melakukan upaya apa pun untuk meningkatkan pendapatannya. Seberapa besar sumber pendapatan pemerintah daerah, termasuk pajak dan retribusi, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya di daerahnya (Muhtar et al. 2018). Tekanan fiskal yang besar akan membuat pemda mengoptimalkan sumber daya di daerahnya sehingga pendapatan pajak dan retribusi semakin besar. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus mengungkapkan informasi pengelolaan keuangan pemerintah (Ortiz-Rodríguez et al. 2018). Kepercayaan masyarakat sangat diperlukan dalam

pemungutan pajak karena memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, tingkat tekanan fiskal yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih transparan.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Balaguer-Coll & Brun-Martos (2021) yang menyimpulkan transparansi dipengaruhi secara positif oleh tekanan fiskal yang diprosikan dengan pendapatan pajak dan retribusi. Semakin besar tingkat pendapatan pajak, semakin besar tingkat penyebaran informasi ekonomi dan keuangan oleh para manajer lokal, yang disebabkan oleh reaksi para manajer publik terhadap meningkatnya permintaan dari masyarakat yang menyatakan minat mereka dengan melakukan pemantauan lebih dekat terhadap pajak, cara uang mereka dibelanjakan. Ortiz-Rodríguez et al. (2018) juga menyatakan bahwa tingkat pajak yang lebih tinggi dapat mengakibatkan peningkatan minat masyarakat terkait bagaimana uang mereka digunakan, yang dapat mendorong pemerintah untuk melaporkan informasi anggaran.

Namun, studi ini tidak selaras dengan hasil temuan Tejedó-Romero & de Araujo (2018) yang mengemukakan bahwa transparansi tidak dipengaruhi tekanan fiskal karena anggaran pemerintah daerah yang mendanai pemerintah tidak hanya berasal dari pendapatan yang dihimpun dari masyarakat, namun juga dari dana transfer dari pemerintah pusat. Muhtar et al. (2018) juga menyatakan bahwa pajak perkapita tidak berpengaruh terhadap transparansi karena anggaran pemerintah daerah yang mendanai pemerintah tidak hanya berasal dari pendapatan yang dihimpun oleh masyarakat, namun juga dari dana transfer dari pemerintah pusat.

Hipotesis kedua yaitu transparansi dipengaruhi oleh belanja modal. Dari hasil dari uji t, nilai koefisien β dari belanja modal menunjukkan nilai $-26,701$, dengan nilai t hitung $-1,095$ dan nilai signifikansi $0,276$. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditelaah bahwa nilai dari t hitung $< t$ tabel yaitu $-1,095 < 1,990$ dengan nilai signifikansi $0,276 > 0,05$ yang artinya transparansi dipengaruhi secara negatif dan tidak substansial oleh variabel belanja modal. Berdasarkan hasil uji maka **hipotesis kedua (H2) ditolak**. Hasil pengujian ini membuktikan kondisi bertentangan dengan konsep legitimasi dimana belanja modal yang besar tidak membuat pemerintah semakin baik untuk melakukan transparansi sebagai bentuk bahwa pemerintah telah bertindak sesuai norma dan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya kecenderungan masih banyaknya permasalahan terkait pelaksanaan belanja modal pada pemerintah daerah. Setidaknya ada empat permasalahan dalam pelaksanaan belanja: overspending, misspending, underspending, dan fraud. Merujuk pada penelitian lain yang mendapatkan hasil berbeda dan menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Balaguer-Coll & Brun-Martos (2021) mengemukakan bahwa anggaran belanja yang besar mendorong tindakan tidak etis pejabat publik sehingga terjadi penyembunyian informasi ekonomi yang mengurangi transparansi. Selain itu, Mubarak et al. (2023) juga menyatakan bahwa belanja modal yang besar dapat mengurangi transparansi karena buruknya pengelolaan belanja modal pemerintah daerah yang ditunggangi oleh berbagai kepentingan manajemen, dalam hal ini pejabat pemerintah. Akibatnya pemerintah daerah dengan belanja modal yang besar terus memberikan informasi keuangan yang terbatas. Teori agensi yang diterapkan dalam studi ini dapat dipergunakan sebagai landasan teori untuk penelitian berikutnya. Teori agensi berkaitan dengan terjadinya conflict of interest yang mengarah pada asimetri informasi antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat) seperti yang dikemukakan Nuryani & Firmansyah (2020) bahwa belanja yang lebih besar menghadapi lebih banyak asimetri informasi dibandingkan yang lebih kecil, yang berarti presentase adanya konflik kepentingan lebih tinggi. Berdasarkan temuan statistik deskriptif, variabel rasio belanja modal mempunyai nilai rata-rata sebesar $16,6\%$ yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah hanya menyisihkan $16,6\%$ dari keseluruhan anggarannya untuk belanja modal. Sementara itu, pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk menaikkan rasio belanja modal keuangan menjadi 30 persen guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Purwanti & Suparman, 2017). Selain tidak menarik minat masyarakat, nilai investasi yang rendah dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang memiliki insentif untuk mempublikasikan informasi keuangannya kepada publik.

Hipotesis ketiga yaitu transparansi dipengaruhi oleh pembiayaan penyetaraan modal. Berdasarkan hasil dari uji t, nilai koefisien β dari pembiayaan penyetaraan modal bernilai positif yaitu $2,666$, dengan nilai t hitung $0,747$ dan nilai signifikansi $0,457$. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditelaah bahwa nilai dari t hitung $< t$ tabel yaitu $0,747 < 1,990$ dengan nilai signifikansi $0,457$

> 0,05 yang artinya transparansi dipengaruhi secara positif dan tidak substansial oleh variabel pembiayaan penyertaan modal. Berdasarkan hasil uji maka **hipotesis ketiga (H3) ditolak**.

Hasil studi pada pengujian ini tidak terbukti mendukung teori legitimasi karena pembiayaan penyertaan modal yang besar tidak membuat pemerintah daerah melakukan keterbukaan informasi yang semakin baik untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hasil studi ini tidak sesuai dengan pengujian yang dilakukan oleh Garrido-Rodríguez et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa banyaknya badan publik yang didirikan oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi. Hasil tes yang tidak konsisten disebabkan oleh penggunaan konsep yang sedikit berbeda. Pembiayaan penyertaan modal di Indonesia meliputi pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Sedangkan penelitian Garrido-Rodríguez et al. (2019) hanya berkaitan dengan banyaknya perusahaan publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengembangan metode pemberian pelayanan publik. Dengan banyaknya pelayanan publik yang diberikan, pemerintah akan semakin melakukan keterbukaan informasi untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat. Penelitian ini sama dengan Yuniar & Firmansyah (2023) yang mengemukakan bahwa transparansi tidak dipengaruhi oleh pembiayaan penyertaan modal karena hanya sedikit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikenal luas oleh masyarakat. Data dari BPS menyatakan bahwa banyak jenis BUMD seperti penyediaan air, pengelolaan sampah, transparansi, serta pengadaan gas dan listrik. Namun yang banyak dikenal masyarakat hanya BUMD penyedia air minum. Sehingga, besarnya pembiayaan penyertaan modal tidak membuat masyarakat menuntut keterbukaan informasi sebagai langkah yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Selain itu, BUMD merupakan lembaga terpisah dari pemerintah daerah yang memiliki tata kelola sendiri. Sedangkan sebagai pemilik, pemerintah daerah juga tidak berkewajiban melakukan konsolidasi layaknya perusahaan induk. Oleh karena itu, informasi keuangan badan usaha milik pemerintah daerah sepenuhnya terpisah dari pemerintah daerah. Akibatnya, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penerima investasi pemerintah tidak menjadi faktor yang memengaruhi tingkat transparansi pemerintah daerah (Cuadrado-Ballesteros, 2014).

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara tekanan fiskal, belanja modal, dan pembiayaan penyertaan modal terhadap transparansi. Sampelnya yang dipakai yakni pemerintah daerah provinsi yang sesuai kriteria pada periode 2020-2022. Di sini pendekatan purposive sampling menghasilkan total 93 sampel yang akan dilakukan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini mengaplikasikan teori legitimasi untuk merumuskan hipotesis, mengujinya, kemudian menarik kesimpulan empiris berdasarkan temuan tersebut, yang meliputi:

1. Gagasan legitimasi bahwa semakin banyak pajak dan retribusi yang diperoleh pemerintah daerah provinsi maka semakin meningkat juga transparansi pengelolaan anggaran diterima. Telah diteliti dan terbukti bahwa pajak dan retribusi yang tinggi artinya pemerintah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik sehingga pemerintah daerah mempublikasikan pengelolaan keuangannya untuk mendapatkan citra baik di masyarakat sehingga dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan legitimasinya.
2. Tidak ada pengaruh belanja modal terhadap transparansi. Berdasarkan uji statistik, studi ini tidak sinkron dengan teori legitimasi yang disimpulkan bahwa transparansi tidak dipengaruhi oleh belanja modal karena sedikitnya nilai investasi dan tidak adanya hubungan antara belanja dengan transparansi. Berdasarkan temuan statistik deskriptif, variabel rasio belanja modal memiliki nilai rata-rata sebesar 16,6% yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah hanya menyisihkan 16,6% dari keseluruhan anggarannya untuk investasi. Selain tidak menarik minat masyarakat, nilai investasi yang rendah dapat

menyebabkan pemerintah daerah kurang memiliki insentif untuk mempublikasikan informasi keuangannya kepada publik.

3. Pengujian pembiayaan penyertaan modal tidak memberikan dampak terhadap transparansi. Uji statistik memperlihatkan bahwa studi ini tidak selaras dengan teori legitimasi karena hanya sedikit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikenal luas oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak menuntut keterbukaan informasi sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Keterbatasan

Keterbatasan yang dimiliki penelitian ini yang harus dipertimbangkan saat menginterpretasikan hasil analisisnya. Beberapa keterbatasan tersebut meliputi:

1. Temuan yang diperoleh mengungkapkan nilai Adjusted R Square yang didapatkan sangat rendah. Kesimpulannya adalah terdapat variabel bebas lain yang bisa memengaruhi transparansi sebagai variabel terikat yang tidak di analisis dalam penelitian ini.
2. Terjadi pemekaran provinsi di Indonesia yang belum dapat mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh komisi informasi pusat. Hal ini pada akhirnya memengaruhi ukuran sampel akhir yang dapat menjadi sumber bias yang potensial.

Saran

Mengacu pada kesimpulan serta keterbatasan yang ada dalam penelitian, ada sejumlah masukan saran dan perlu mempertimbangkan melakukan pengembangan serta perluasan untuk penelitian berikutnya.

1. Faktor-faktor lain yang memberikan implikasi terhadap transparansi yang tidak ada pada studi ini seperti pendapatan transfer, belanja pegawai, hutang, pengangguran, jumlah penduduk, gender kepala daerah, dan kekuatan politik.
2. Studi seterusnya dapat memakai proksi lain untuk transparansi yang dapat mencakup semua provinsi di Indonesia seperti menggunakan data primer dengan memberikan skor sesuai kriteria tertentu, setiap proksi akan memberikan gambar yang unik dan memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik.
3. Penelitian seterusnya dapat mengembangkan cakupan objek penelitian, yang tidak hanya berfokus pada transparansi akan tetapi juga akuntabilitas.

**REFERENSI**

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Alcaraz-Quiles, F. J., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D. (2015). Factors determining online sustainability reporting by local governments. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 79–109. <https://doi.org/10.1177/0020852314541564>
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedó-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327–347. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199>
- Archel, P., Husillos, J., Larrinaga, C., Spence, C., Archel, P., Husillos, J., Larrinaga, C., Spence, C., Journal, A., & Journal, A. (2009). Article information :
- Armstrong, E. (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. *Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging*, August.
- Balaguer-Coll, M. T., & Brun-Martos, M. I. (2021). The effects of the political environment on transparency: evidence from Spanish local governments. *Policy Studies*, 42(2), 152–172. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1599838>
- Baldissera, J. F., Asta, D. D., & Casagrande, L. F. (2020). electoral aspects on the transparency of local governments. 54(2), 340–359.
- BPK. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Colquhoun, P. (2013). Political and organizational legitimacy of public sector auditing in New Zealand local government. *Accounting History*, 18(4), 473–489. <https://doi.org/10.1177/1032373213505798>
- Cuadrado-Ballesteros, B. (2014). The impact of functional decentralization and externalization on local government transparency. *Government Information Quarterly*, 31(2), 265–277. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.012>
- De Fine Licht, J., Naurin, D., Esaiasson, P., & Gilljam, M. (2014). When Does Transparency Generate Legitimacy? Experimenting on a Context-Bound Relationship. *Governance*, 27(1), 111–134. <https://doi.org/10.1111/gove.12021>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Garrido-Rodríguez, J. C., López-Hernández, A. M., & Zafra-Gómez, J. L. (2019). The impact of explanatory factors on a bidimensional model of transparency in Spanish local government. *Government Information Quarterly*, 36(1), 154–165. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.10.010>
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10 (X). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Mubarok, D. A., Paramita, N. W. S. G., & Firmansyah, A. (2023). Local Government Dependence , Capital Expenditures , Transparency Level : Moderating Role Of Local Government Size. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 7(1), 23–36.
- Muhtar, M., Sutaryo, S., & Suryanto, M. (2018). Towards regional sustainable development via government financial transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 7(4), 753–767. [https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4\(12\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4(12))
- Nuryani, & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local government websites: Evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(2), 145–155. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.82.145.155>



- Ortiz-Rodríguez, D., Navarro-Galera, A., & Alcaraz-Quiles, F. J. (2018). The Influence of Administrative Culture on Sustainability Transparency in European Local Governments. *Administration and Society*, 50(4), 555–594. <https://doi.org/10.1177/0095399715616838>
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments? *International Public Management Journal*, 13(4), 350–380. <https://doi.org/10.1080/10967494.2010.524834>
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen attitudes toward transparency in local government. *American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323. <https://doi.org/10.1177/0275074006296777>
- PP No. 58 tahun, 2008. (2005). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 105.
- Purwanti, R. E., & Suparman, L. (2017). The Determinants Transparency and Accessibility of Internet Financial Reporting on Local Government in Indonesia. *Papers*, 378. <http://inet.detik.com>
- Republik Indonesia. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008. Undang-Undang Nomor 14, 3(2), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. 010464, 14881.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Suchman, M. C. (1995). MANAGING LEGITIMACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES. *MANAGING LEGITIMACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES*, 20(3), 120–160. <https://doi.org/10.1061/9780784409398.ch05>
- Tejedo-Romero, F., & de Araujo, J. F. F. E. (2018). Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data. *Administration and Society*, 50(4), 527–554. <https://doi.org/10.1177/0095399715607288>
- Triyanto, H. (2017). Pengaruh penyertaan modal daerah, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk usia produktif terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/ kota di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3), 1–16. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/20905>
- Yuniar, M. R., & Firmansyah, A. (2023). The Transparency Level of Local Governments in Indonesia: Does the Level of Financial Health Matter? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 123–150. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1195>